

Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Anistya Fitri Larasati¹, Marsela Diaz², Syarifah Novieyana³
^{1,2,3}Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : Jan 19, 2024
Revised : Feb 17, 2024
Accepted : Mar 20, 2024

Keywords:

Effectiveness value;
Contributin value;
Regional Tax Revenue;
Regional Original Income.

ABSTRACT

This research aims to see the influence of the effectiveness and contribution value of regional tax revenues on the Regional Original Income (PAD) of districts and cities in West Kalimantan province during the Covid-19 pandemic. This research was conducted to test and analyze the relationship and correlation between the effectiveness of regional taxes and the contribution of regional taxes to local revenue for 14 districts and cities in West Kalimantan province. This type of research is associative research using data from district and city regional government financial reports in West Kalimantan province for 2020-2022. Researchers used Financial Report data for the last 3 years because an extraordinary event called Covid-19 occurred which affected local government income from taxes, levies and other income. Based on the results of simultaneous Hypothesis Testing for the variables Regional Tax Effectiveness (X1) and Regional Tax Contribution (X2) together they will influence the Original Regional Income of Regencies and Cities in West Kalimantan and the influence is 63.9%, while the remaining 36.1% is influenced by other factors outside this regression model.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Anistya Fitri Larasati
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak
Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78123
Email: anistya.fl@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu terus menerus menjadi fokus dalam Anggaran Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Manumpil, A., & Sumual, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran (Rahmawati, M., & Fajar, 2017). Pendapatan Daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Wati, 2014).

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan

Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antara sumber-sumber pendapatan asli daerah diatas, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial serta memegang peranan yang penting dalam kontribusinya pada pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Untuk itu Pemerintah daerah harus memiliki informasi dan pengetahuan untuk dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah serta berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah ini (Candrasari, A., & Ngumar, 2016).

Selama pandemi COVID-19 yang dimulai sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2022 sangatlah mempengaruhi perekonomian Indonesia, dimana terjadi pembatasan sosial di masyarakat sehingga menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi diberbagai wilayah di Indonesia. Hal ini jelas berdampak serius pada perekonomian di Indonesia termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat seperti banyaknya usaha yang harus ditutup dan gulung tikar, tempat hiburan dan restoran yang tidak beroperasi, pekerjaan dan pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah dan toko-toko, pasar dan mal terpaksa menutup tokonya atau membatasi jam operasionalnya. Kejadian ini jelas sangat berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat yang akhirnya turut andil pada pendapatan daerah yang salah satunya bersumber dari pajak daerah. Begitu juga dengan Pemerintah daerah Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga turut merasakan dampak ekonomi ini dimana selama 3 tahun terakhir yaitu 2020 – 2022 terjadi penerimaan pajak yang berfluktuatif dan cenderung menurun di 14 (empat belas) kabupaten dan kota yang ada di provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah banyak dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, begitu juga penelitian mengenai pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di suatu daerah juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya mengambil objek penelitian di satu kabupaten atau kota saja tapi mengambil objek penelitian dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota. Hal ini peneliti lakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh pajak daerah terhadap PAD yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan daerah suatu kabupaten/kota. Apalagi dengan mulai banyaknya rencana pemekaran wilayah di Kalimantan Barat ini, maka haruslah diperhitungkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan dan program-programnya sehingga tidak lagi bergantung dengan Pemerintah diatasnya yaitu Pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu isu COVID 19 yang terjadi beberapa tahun terakhir kemarin, jelas sangat mempengaruhi besaran penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat, sedangkan penelitian sejenis ini banyak dilakukan sebelum pandemic COVID 19 terjadi.

Penelitian (Humaira, 2022) tentang Pengaruh efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Bulanan Pendapatan Daerah selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018 hingga 2020 dan sampel yang digunakan berjumlah 36 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan uji statistika deskriptif, analisis regresi data panel uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji hipotesis dengan uji t-parsial dan uji F-simultan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial dan simultan efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah, efektivitas retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian (Utami, 2021) tentang Pengaruh Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Efektifitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan pada tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas penerimaan pajak daerah (X1) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, efektivitas penerimaan retribusi daerah (X2) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai R^2 adalah sebesar 0.991 yang artinya 99.1% pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh efektivitas penerimaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan retribusi daerah, sedangkan 0.09% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Penelitian (Effendi, 2021) melihat pengaruh efektivitas pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam, Objek penelitian ini adalah Dispenda Kota Batam.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu atau purposive sampling dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan efektivitas pajak parkir dan iuran pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sementara secara parsial efektivitas pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, namun kontribusi pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Dispenda Kota Batam.

Penelitian (Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, 2022) tentang Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. dengan menggunakan data target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD Provinsi Bali periode 2016-2020. Hasil penelitian ini di peroleh bahwa rata-rata persentase efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 97.11% dengan kriteria efektif dan 85.55% dengan kriteria sangat baik berkontribusi, rata-rata efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 84.84% dengan kriteria cukup efektif dan 1.20% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Penelitian (Wahyuni, R. A. P., & Arief, 2020) tentang Pengaruh efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial, efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena tidak konsistennya rasio efektivitas yang dapat dijelaskan oleh perhitungan rumus efektivitas. Rasio efektivitas sudah menunjukkan kriteria sangat efektif namun tidak selaras dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah. Dan secara parsial, kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung karena penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung selalu mengalami peningkatan presentase kontribusi pada realisasi Pajak Daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan selalui melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di publikasi oleh beberapa peneliti terlihat bahwa, penelitian mengenai analisis efektifitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Hal ini bisa disebabkan banyak faktor yang memang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari suatu kabupaten/kota dan Provinsi, mulai dari komposisi PAD, kebijakan daerah hingga faktor-faktor eksternal lainnya. Penelitian yang saat ini kami lakukan mencoba melihat bagaimana pengaruh kejadian COVID 19 dan faktor-faktor lainnya yang terjadi di tahun 2020 – 2022 di Provinsi Kalimantan Barat mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini nantinya akan menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat. Mana kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar dan mana kabupaten/kota yang masih perlu upaya ekstra dalam meningkatkan pajak daerahnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

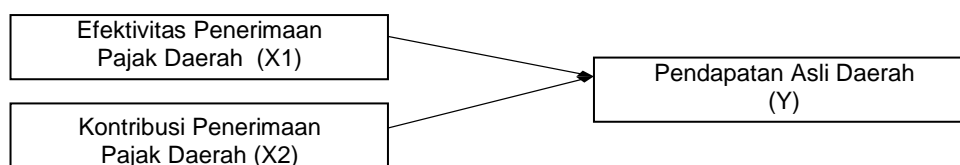
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian asosiatif. menggunakan jenis data kuantitatif (Sugiyono, 2016). Dan data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi pendapatan asli daerah dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRA-APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan sampel diperoleh dari data *time series* laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat dari tahun 2020-2022 dimana saat itu terjadi Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen (Suryani, F., & Pariani, 2018). Variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independennya adalah efektivitas penerimaan pajak daerah dan kontribusi penerimaan pajak daerah. Berikut model penelitian ini:



Gambar 1. Model Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Efektivitas penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.
 H2: Kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat.
 H3: Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat

2.5 Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linear Berganda dengan Uji T dan Koefisien regresi dan determinasi (Yuniarta, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 hingga 2022 diperoleh data berikut ini:

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2022

No	Nama Kabupaten /Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Efektifitas	Kriteria	Efektifitas	Kriteria	Efektifitas	Kriteria
1	Bengkayang	95,41	Efektif	97,46	Efektif	97,75	Efektif
2	Landak	92,20	Efektif	76,57	Kurang Efektif	56,02	Tidak Efektif
3	Kapuas Hulu	83,87	Cukup Efektif	91,50	Efektif	94,06	Efektif
4	Ketapang	133,92	Sangat Efektif	185,58	Sangat Efektif	100,37	Sangat Efektif
5	Mempawah	88,38	Cukup Efektif	88,33	Cukup Efektif	180,51	Sangat Efektif
6	Sambas	77,57	Kurang Efektif	101,20	Sangat Efektif	46,55	Tidak Efektif
7	Sanggau	104,54	Sangat Efektif	109,95	Sangat Efektif	92,99	Efektif
8	Sintang	52,21	Tidak Efektif	78,46	Kurang Efektif	42,82	Tidak Efektif
9	Pontianak	75,03	Kurang Efektif	76,41	Kurang Efektif	92,50	Efektif
10	Singkawang	85,82	Cukup Efektif	96,73	Efektif	108,64	Sangat Efektif
11	Sekadau	60,54	Kurang Efektif	74,17	Kurang Efektif	52,88	Tidak Efektif
12	Melawi	48,21	Tidak Efektif	68,90	Kurang Efektif	92,79	Efektif
13	Kayong Utara	73,24	Kurang Efektif	78,48	Kurang Efektif	84,04	Cukup Efektif
14	Kubu Raya	81,80	Cukup Efektif	101,74	Sangat Efektif	121,74	Sangat Efektif

Dari 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat bahwa untuk efektivitas penerimaan pajak daerah di tahun 2020 hingga 2022 terdapat 4 Kabupaten dan Kota yang mendapatkan kategori Sangat Efektif ditahun 2022 yaitu kabupaten Ketapang, kabupaten Mempawah, kota Singkawang dan kabupaten Kubu Raya. Dan untuk tahun 2021 kabupaten kota yang sangat efektif adalah kabupaten Ketapang, kabupaten Sanggau, kabupaten Sambas dan kabupaten Kubu Raya. Dan Pada tahun 2020, kabupaten yang masuk dalam kategori sangat efektif adalah kabupaten Ketapang dan kabupaten Sanggau. Kategori keefektifitasan ini di lihat dari perbandingan antara realisasi dengan target atau pagu anggaran pajak daerah yang telah ditetapkan

dalam APBD. Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah berdasarkan besaran target penerimaan pajak daerah.

Tabel 2. Rasio Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 – 2022

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Kontribusi	Kriteria	Kontribusi	Kriteria	Kontribusi	Kriteria
1	Bengkayang	27,49	Cukup Baik	26,86	Sedang	25,89	Sedang
2	Landak	43,52	Baik	29,39	Sedang	32,11	Cukup Baik
3	Kapuas Hulu	15,89	Kurang	18,61	Kurang	23,39	Sedang
4	Ketapang	56,21	Sangat Baik	54,97	Sangat Baik	51,14	Sangat Baik
5	Mempawah	34,32	Cukup Baik	38,42	Cukup Baik	51,62	Sangat Baik
6	Sambas	23,95	Sedang	27,35	Sedang	23,20	Sedang
7	Sanggau	32,00	Cukup Baik	33,48	Cukup Baik	35,33	Cukup Baik
8	Sintang	23,08	Sedang	25,44	Sedang	25,66	Sedang
9	Pontianak	64,16	Sangat Baik	66,26	Sangat Baik	64,93	Sangat Baik
10	Singkawang	31,30	Cukup Baik	31,02	Cukup Baik	32,59	Cukup Baik
11	Sekadau	26,65	Sedang	30,08	Cukup Baik	26,84	Sedang
12	Melawi	32,23	Cukup Baik	25,99	Sedang	49,68	Baik
13	Kayong Utara	13,43	Kurang	16,54	Kurang	13,72	Kurang
14	Kubu Raya	71,69	Sangat Baik	72,98	Sangat Baik	75,00	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat, yang memperoleh kategori Sangat Baik dalam rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2022 adalah kabupaten Ketapang, kabupaten Mempawah, kabupaten Kubu Raya dan kota Pontianak. Dan di tahun 2020 dan 2021, kabupaten dan kota yang mendapat kriteria Sangat Baik yaitu kabupaten Ketapang, kabupaten Kubu Raya dan kota Pontianak. Rasio Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya adalah melihat rasio Pendapatan Asli Daerah yang ditentukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target PAD yang telah ditetapkan dalam pagu APBD. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAS yang sah. Berikut ini disajikan tabel rasio perbandingan antara Realisasi dan Target PAD tahun 2022 di Kalimantan Barat.

Tabel 3. Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 – 2022

No	Nama Kabupaten/Kota	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
		2020	2021	2022
1	Bengkayang	96,52	106,62	109,08
2	Landak	102,72	103,73	93,67
3	Kapuas Hulu	94,69	103,21	105,93
4	Ketapang	145,60	147,72	121,57
5	Mempawah	116,15	96,12	172,05
6	Sambas	85,50	112,23	88,62
7	Sanggau	113,09	116,98	114,45
8	Sintang	87,29	114,27	84,51
9	Pontianak	75,23	76,84	95,91
10	Singkawang	95,30	100,26	114,94
11	Sekadau	77,60	81,69	76,44
12	Melawi	67,50	128,04	78,11
13	Kayong Utara	116,64	83,22	116,39
14	Kubu Raya	83,84	100,31	118,41

Berdasarkan data tabel 8 diatas terlihat bahwa Rasio PAD diatas 100% di tahun 2022 yaitu kabupaten Bengkayang, kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten Ketapang, kabupaten Mempawah, kabupaten Sanggau, kota Singkawang, kabupaten Kayong Utara dan kabupaten Kubu Raya. Di tahun 2021 yang mendapatkan Rasio PAD diatas 100% adalah kabupaten Bengkayang, kabupaten Landak, kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten Ketapang, kabupaten Sanggau, kabupaten Sambas, kabupaten Sintang, kota Singkawang, kabupaten Melawi dan kabupaten Kubu Raya. Dan dari data tabel ini maka dilakukan pengujian sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel berdistribusi normal atau tidak

(Setyawati, 2023).

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12.77214958
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.058
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian diatas dimana Asymp sig (2-tailed) bernilai 0,200 yang berarti diatas $\alpha=0,05$ maka dengan demikian sudah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menyesuaikan dan melihat apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi linear (Wahyuni, 2015). Jika variabel independen berkorelasi tinggi, artinya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen akan terganggu.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	51.626	6.699		7.706	.000					
	Efektifitas	.593	.072	.811	8.223	.000	.797	.796	.791	.951	1.051
	Kontribusi	-.032	.051	-.062	-6.26	.535	.117	-.100	-.060	.951	1.051

a. Dependent Variable: Realisasi PAD

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai dari variabel Efektivitas Pajak Daerah (X1) dan Kontribusi Pajak Daerah (X2) mencapai 0,951 yang berarti $>0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah 1,051 yang berarti <10 . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.

3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) (Mediyustiani, 2016)

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.800 ^a	.639	.621	13.09555	.639	34.558	2	39	.000	2.274

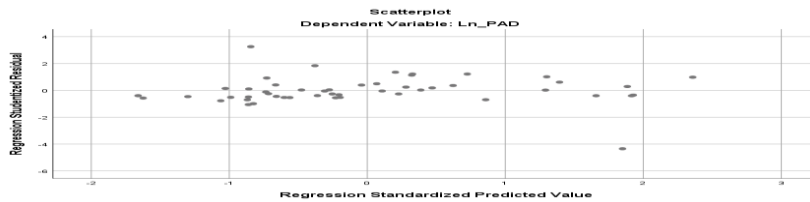
a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektifitas

b. Dependent Variable: Realisasi PAD

Berdasarkan tabel output “Model Summary” diatas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2,274. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) = 42, maka diperoleh nilai Du (batas dalam) = 1,682 dan dl (batas luar) = 2,018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai d sebesar 2,329 terletak diatas batas luar. Namun karena data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data time series tahun 2020 – 2022 maka model regresi ini masih dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi (Eksandy, 2017)



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari grafik scatterplot diatas, terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu yang terbentuk dan titik titik tersebut tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, melainkan titik-titik tersebut menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (T-Test)

Tabel 7. Hasil Pengujian T Test

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51.626	6.699		7.706	.000
	Efektifitas	.593	.072	.811	8.223	.000
	Kontribusi	-.032	.051	-.062	-.626	.535

a. Dependent Variable: Realisasi PAD

Dengan melihat output SPSS diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama.** Untuk variabel Efektivitas diperoleh t hitung sebesar 8,223 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,593 atau 59,3%, hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 59,3%. Jadi, untuk hipotesis yang diajukan yaitu “efektivitas pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah”, dapat diterima. **Kedua.** Untuk variabel Kontribusi diperoleh t hitung sebesar -0,626 dengan nilai signifikansi 0,535, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah (X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,032, hal ini menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jadi, untuk hipotesis yang diajukan “kontribusi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah”, tidak dapat diterima atau di tolak.

Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.639	.621	13.09555

a. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektifitas

b. Dependent Variable: Realisasi PAD

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,639 hal tersebut berarti 63,9% variabel PAD (Y) dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen yaitu Efektivitas Pajak Daerah (X1) dan Kontribusi Pajak Daerah (X2), sedangkan sisanya 36,1% dijelaskan oleh sebab lain diluar model regresi ini.

3.3.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (F-Test)

Tabel 9. Hasil Pengujian F-Test

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11852.936	2	5926.468	34.558	.000 ^b
	Residual	6688.240	39	171.493		
	Total	18541.176	41			

a. Dependent Variable: Realisasi PAD

b. Predictors: (Constant), Kontribusi, Efektifitas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Uji f menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian diperoleh F hitung sebesar 34,558 jika dibandingkan dengan F tabel senilai 3,220 maka diperoleh $34,558 > 3,220$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Efektivitas Pajak Daerah (X1) dan Kontribusi Pajak Daerah (X2) secara bersama sama akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan antara lain yaitu: Berdasarkan kriteria Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah untuk 14 (empat belas) kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2020 hingga 2022 di peroleh data bahwa hanya Kabupaten Ketapang yang mendapatkan kriteria Sangat Efektif selama 3 tahun terakhir. Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah berdasarkan besaran target penerimaan pajak daerah, yang artinya bahwa kabupaten Ketapang mampu memperoleh realisasi pajak daerah yang melampaui target atau pagu anggaran yang telah ditetapkan selama tahun 2020 hingga 2022.

Berdasarkan kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2020 hingga tahun 2022 di peroleh data bahwa kabupaten Ketapang, kota Pontianak dan kabupaten Kuburaya mendapatkan kriteria Sangat Baik selama 3 tahun berturut-turut. Kriteria Sangat Baik ini diperoleh bilamana kontribusi pajak daerah melebihi 50% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis secara parsial terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah selama tahun 2020 hingga 2022 untuk 14 (empat belas) kabupaten dan kota di Kalimantan Barat di peroleh bahwa Efektifitas Pajak Daerah berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dan pengaruh sebesar 59,3%. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa "Efektivitas pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah", dapat diterima.

Sedangkan hasil Uji Hipotesis secara parsial untuk variable Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 14 (empat belas) kabupaten dan kota di Kalimantan Barat tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa "Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah", di tolak atau tidak dapat diterima. Hal ini dapat disebabkan nilai kontribusi pajak daerah yang berbeda-beda terhadap pendapatan asli daerahnya.

Dan untuk hasil Uji Hipotesis simultan untuk variable Efektivitas Pajak Daerah (X1) dan Kontribusi Pajak Daerah (X2) secara bersama sama akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat dan pengaruhnya sebesar 63,9%, sedangkan sisanya 36,1% dipengaruhi oleh factor lain diluar model regresi ini.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini maka saran yang dapat peneliti berikan adalah: Setiap pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan upaya untuk mencapai bahkan melampaui target/pagu anggaran penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan karena hal ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Walaupun kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan namun pemerintah daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat perlu mencari alternatif sumber penerimaan daerah lainnya yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Hasil penelitian ini berbeda dari beberapa hasil penelitian yang menggunakan variabel penelitian yang sama, hal ini dapat disebabkan karena setiap daerah memiliki ciri khas dan sumber penerimaan daerah yang berbeda-beda dan beragam sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir secara umum.

Referensi

- Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Effendi, syahril. (2021). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, *Jurnal Akuntansi Bareleng Vol. 5 No. 2*, Hal 67-73.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keua*.
- Humaira, A. (2022). Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020, Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Manumpil, A., & Sumual, F. M. (2022). Analisis Perencanaan Keuangan APBD Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 157-166.
- Mediyustiani, R. (2016). Pengaruh Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BE) periode tahun 2010–2014. *Jurnal Akuntansi dan Keu*.
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900-1911.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota bandung. *Jurnal kajian akuntansi*, 1(1).
- Setyawati, R. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(1), 57-63.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: ALFABETA.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PEKA*, 6(1), 11-22.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penerimaan daerah dan pajak daerah
- Utami, T. (2021). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesia n Accounting Research Journal*, 1 (1), 98–107.
- Wahyuni, E. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Organisasi Sektor Publik Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya). *Nominal Barometer Riset Akuntansi*.
- Wati, I. (2014). Analisis prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada ppk-skpd dinas pengelolaan keuangan daerah kota tangerang. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 14(2), 113-132.
- Yuniarta, G. A. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Financial Distress, Insentif Pajak dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Profesi*,.